



Sistem Politik Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Cindy Yohanna Marpaung¹, Herman Parjuangan Marpaung², Mey Roinda Situmorang³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Received: 17 April 2024
Revised : 24 April 2024
Accepted: 01 Mei 2024

Abstract

Sistem politik dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor seperti kondisi lingkungan, sosial, ekonomi suatu negara atau adanya dorongan dari masyarakat yang menginginkan perubahan. Penelitian ini memiliki maksud utama untuk mengetahui sistem politik yang digunakan pada masa kepemimpinan presiden B.J. Habibie. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka. Sumber penelitian merupakan sumber sekunder dari jurnal atau buku yang relevan. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis data dianalisis secara deskriptif dengan mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa kepemimpinan presiden B.J. Habibie telah membawa dampak perubahan sistem politik yang sangat besar pada Indonesia. Sistem politik pada pemerintahan B.J. Habibie adalah sistem politik transisi demokratis, dari sistem politik otoriter. Sistem politik B.J. Habibie memiliki corak demokratis dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas dalam kehidupan politik, sistem politik yang terbuka dan mendengar masyarakat, sistem politik dilakukan terbuka dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung terbuka, rahasia, dan jujur, serentak, serta diikuti oleh partai politik yang multi partai dengan 48 partai. Sistem politik B.J. Habibie juga bersifat desentralisasi dari sebelumnya sentralisasi, tidak hanya dominan pada pihak eksekutif yakni presiden, namun juga melibatkan secara aktif pihak legislatif untuk menjalankan fungsinya, dan sistem politik terbuka dengan memberikan kebebasan pers.

Keywords: B.J Habibie, Pemerintahan, Sistem Politik

(*) Corresponding Author: indymarpaung@gmail.com

How to Cite: Marpaung, C. Y., Marpaung, H. P., & Situmorang, M. R. (2024). Sistem Politik Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11172737>

INTRODUCTION

Guna mampu menjalankan fungsinya sebuah negara sangat bergantung pada pemerintahan yang merupakan para pelaku politik. Berjalannya suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Hal ini karena politik merupakan alat yang digunakan oleh pemerintahan selaku orang – orang yang menjalankan sistem negara untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka membuat kebijakan atau sebuah keputusan. Sistem politik merupakan alat berupa alat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang memiliki fungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan suatu negara, mengatur antar individu dengan individu dan kelompok dan kelompok dalam negara, mengatur hubungan negara dengan negara lainnya hingga alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dalam sebuah negara (Sahya, 2013). Pada tahun 1950 David Eaton mulai mengembangkan sebuah kerangka kerja yang ditujukan untuk mengetahui lebih dalam sebuah kehidupan politik yakni melalui kerangka yang disebut dengan istilah sistem politik yang ditunjukkan sebagai alat yang dapat digunakan untuk melihat menganalisis lebih dalam kehidupan politik pada suatu negara di berbagai belahan dunia. Sistem politik merupakan sebuah siklus yang memiliki fungsi sebagai alat integrasi antara

para pelaku politik dalam pemerintahan suatu negara dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat sebuah regulasi dengan proses politik oleh lembaga eksekutif atau legislatif yang terdiri dari elit politik pula (Budi, 2007); (Sahya, 2013).

Sistem politik pada suatu negara merupakan hal yang tidak bersifat mutlak dan dapat mengalami berbagai perubahan, berbagai negara telah mengalami sistem politik setelah menempuh perjalanan panjang, bahkan beberapa negara mengalami perubahan sistem politik dalam kurun waktu yang cukup pendek, keinginan para pemerintah, elit politik dan masyarakat dalam suatu negara demi kepentingan dan kebaikan berbagai pihak untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik merupakan salah satu alasan yang dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sistem politik pada suatu negara, perubahan sistem politik pada suatu negara merupakan hal yang lumrah dan dianggap sebagai hal biasa bukan sebuah ancaman selama perubahan tersebut dilakukan dengan landasan memperhatikan kelebihan dan kekurangan sistem politik yang sebelumnya telah diterapkan pada negara tersebut. Sistem politik di Indonesia sendiri memiliki makna sebagai sebuah keseluruhan proses yang bersifat utuh atau hanya sebagian, perangkat interaksi yang diabstraksikan kepada masyarakat berupa keseluruhan perilaku sosial melalui nilai – nilai yang disebarkan pada masyarakat dan negara indonesia, sistem politik di Indonesia merujuk pada sistem politik yang digunakan Indonesia sebagai negara di masa saat ini atau sistem politik yang pernah berlaku selama Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Sama seperti negara lain yang telah banyak mengalami perubahan sistem politik, Dalam perjalanan sejarahnya Indonesia adalah negara yang telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik, dapat diketahui adanya perbedaan esensial sistem politik dari masa pertama kali Indonesia merdeka hingga sistem politik saat ini, adanya beberapa kali perbedaan sistem politik dari periode satu kepemimpinan presiden Indonesia ke periode lainnya, meski tidak diikuti dengan adanya perubahan pada falsafah negara, dalam sejarah bangsa Indonesia, sistem politik Indonesia mengalami beberapa perubahan sistem hal ini terjadi karena falsafah bangsa Indonesia dianggap tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem politik dan politisi, hingga adanya perbedaan sistem politik dengan cita – cita bangsa sehingga sistem politik tidak mampu mendukung cita – cita bangsa. Hingga kondisi sosial, ekonomi dan politik yang memburuk hingga memunculkan adanya gejolak atau dorongan perubahan masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan cita – cita dan kepentingan masyarakat dan negara Indonesia (Komara, 2016); (Sahya, 2013).

Kondisi krisis yang melanda Indonesia di tahun 1997 telah memperburuk citra kepemimpinan presiden soeharto dan meruntuhkan kredibilitas masa orde baru, yang memunculkan kelompok anti orde baru. Adanya keinginan masyarakat akan adanya perubahan reformasi dan demokrasi, yakni demokrasi baru, konstitusi yang transparan dan akuntabel dan reformasi yang bebas KKN dan nepotisme di era kepemimpinan soeharto telah menyebabkan runtuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan soeharto karena adanya dorongan kuat masyarakat akan adanya perubahan rezim. Keruntuhan rezim soeharto tidak hanya memberikan adanya perubahan pergantian rezim pemerintahan negara Indonesia saat itu, namun juga menyebabkan terjadinya perubahan rezim sistem politik yang menyebabkan terjadinya perombakan seluruh aspek sosial, ekonomi, dan politik, yang menjadi

cikal bakal terbentuknya sistem politik demokrasi yang mengakar hingga saat ini (Haris, 2014)

Salah satu perubahan sistem politik yang dianggap sangat mencolok yang pernah terjadi di Indonesia adalah perubahan sistem politik yang terjadi di era kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Perpindahan kekuasaan dari presiden sebelumnya Soeharto kepada wakil presidennya B.J. Habibie yang terjadi pada tanggal 21 mei 1998 dianggap menjadi perubahan sistem politik yang membawa corak perubahan sangat besar dan memberikan pengaruh sangat besar pada sistem politik yang berlaku sekarang di Indonesia. Era kepemimpinan B.J. Habibie dikenal dengan era reformasi yang dianggap sebagai era perubahan besar dalam sistem politik, pemerintahan dan tatanan kenegaraan Indonesia yang dianggap memberikan perubahan – perubahan yang sangat berarti pada sistem politik Indonesia (Kacung, 2010). Oleh karena itu dalam artikel jurnal ini penulis ingin secara mendalam memaparkan sistem politik yang digunakan bangsa Indonesia di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

METHODS

Penelitian dengan judul sistem politik pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini masuk dalam penelitian kajian pustaka. Menurut Zed (2018) Dalam (Kurniawan et al., 2021) Jenis penelitian kajian pustaka merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui proses pengumpulan data pustaka melalui sumber ilmiah, jurnal buku, dan diikuti dengan kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah data kepustakaan yang diperoleh menjadi bahan penelitian, tanpa diikuti dengan riset lapangan. Pada penelitian ini seluruh bahan yang digunakan untuk bahan penelitian ini diperoleh melalui proses studi pustaka dengan memanfaatkan jurnal – jurnal ilmiah, serta buku yang relevan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder merupakan sumber data tertulis yang penulis peroleh melalui kajian pustaka pada jurnal – jurnal ilmiah dan buku – buku yang relevan dengan penelitian penulis. Data dikumpulkan penulis dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi berupa mencari data – data melalui sumber kepustakaan buku atau jurnal. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan ditarik kesimpulan dari umum ke khusus kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa narasi, bukan dalam bentuk angka atau bagan.

RESULTS & DISCUSSION

A. Sistem Politik

Istilah politik dijelaskan pertama kali oleh Easton, dalam tafsiran Easto, politik adalah sebuah proses alokasi nilai pada suatu masyarakat yang bersifat otoritatif. Menurut Easton suatu negara tidak pernah dapat dipisahkan dengan politik oleh karenanya politik memiliki sifat otoriter yang artinya politik memiliki hubungan langsung dengan suatu negara. Lebih lanjut Easton menjelaskan sistem politik merupakan sebuah perangkat atau alat yang digunakan untuk dapat mengetahui kehidupan politik yang diterapkan oleh suatu negara (Komara, 2016).

Sistem politik merupakan definisi yang tercipta dari dua kalimat utama yakni sebuah sistem dan politik. Sistem memiliki makna rangkaian utuh beberapa komponen dimana setiap komponen memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan. Sedangkan politik sendiri secara konseptual adalah sebuah usaha yang diambil oleh warga negara sebagai wujud untuk mencapai kebaikan bersama, konsep yang terdiri dari hal – hal yang berhubungan dengan negara, segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dengan tujuan mempertahankan kekuasaan, serta suatu konflik untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap penting. Sehingga sistem politik didefinisikan sebagai sebuah prinsip atau mekanisme yang bersifat utuh satu kesatuan, dan saling berhubungan yang memerankan fungsi untuk mengatur pemerintahan pada suatu negara, dan mempertahankan kekuasaan pada suatu negara melalui cara mengatur hubungan individu dengan individu di negara tersebut dan hubungan negara tersebut dengan negara lain (Anwar, 2010). Sistem politik merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdiri atas sejumlah lembaga – lembaga dan aktivitas politik masyarakat yang memiliki tujuan utama menghasilkan adanya perubahan tuntutan – tuntutan (*Demands*), dukungan – dukungan (*Support*, Sumber – sumber (*Resources*) untuk menjadi sebuah keputusan – keputusan atau kebijakan dengan sifat otoritatif atau kebijakan kebijakan yang bersifat mengikat dan berasaskan kepentingan seluruh masyarakat pada suatu negara (Sahya, 2013).

Sistem politik setidaknya memiliki beberapa komponen diantaranya seperti (1) subsistem masukan (input), (2) sub sistem proses, (3) sub sistem keluaran, (4) sub sistem lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh faktor diluar sub sistem politik seperti sosial, ekonomi, budaya, keamanan serta geografis suatu negara, (5) subsistem *feedback*. Sedangkan unit – unit sistem politik sendiri meliputi tindakan politik seperti pembuatan UUD, pengawasan presiden dan DPR hingga tuntutan masyarakat pada pemerintah dan sejenisnya Sistem politik merupakan sebuah kehidupan politik yang merupakan sebuah sistem interaksi yang ditentukan oleh kenyataan yang berkaitan dengan penyebaran nilai – nilai secara otoritas dalam masyarakat. Terbentuknya perilaku politik atau sistem politik baik pada pemilik kekuasaan pada suatu negara dengan yang dikuasai atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, budaya, hingga ekonomi suatu negara tersebut, oleh karenanya, perilaku atau sistem politik dapat mengalami perubahan dari satu periode kepemimpinan ke periode lainnya pada suatu negara tak terkecuali Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan. Kondisi lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi serta adanya dorongan atau tuntutan dari masyarakat atas keinginan untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan kepentingan bersama dapat mendorong terjadinya perubahan sistem politik pada suatu negara (Komara, 2016).

B. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie

Awal masa pemerintahan presiden B.J Habibie ditandai dengan semakin buruknya kondisi perekonomian bangsa Indonesia di tahun 1997 yang mengantarkan Indonesia menuju kondisi krisis moneter, kondisi perekonomian Indonesia yang tidak baik dan kegagalan presiden dalam mengatasi permasalahan tersebut telah menimbulkan kemunculan kelompok mahasiswa yang mendorong adanya gerakan reformasi yang menyatakan keinginan untuk menjadi saingan pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, terjadinya kondisi krisis ekonomi, kegagalan Soeharto dalam mengatasinya dan timbulnya

berbagai ketegangan dan kerusuhan diberbagai tempat dan daerah hingga menyebabkan kehancuran citra masa kepemimpinan orde baru. Masa pemerintahan presiden B.J. Habibie resmi dimulai pada 21 mei 1998, setelah kejatuhan soeharto, soeharto menunjuk B.J habibie yang sebelumnya merupakan wakil presiden Soeharto untuk menggantikan jabatannya sebagai presiden (Kurniawan et al., 2021).

Presiden B.J habibie resmi menggantikan posisi soeharto sebagai presiden pada kamis 21 mei 1998 pukul 09.00 WIB berdasarkan ketentuan TAP MPR No.VI 1973. Susunan kabinet baru dibawah kepemimpinan presiden B.J. Habibie diumumkan pada 22 mei 1998, dimana di bawah kepemimpinannya, B.J Habibie memberikan nama kabinetnya dengan nama kabinet reformasi pembangunan. Kepemimpinan presiden BJ. Habibie merupakan tanda awal berakhirnya kabinet pembangunan VII dan menjadi awal baru lahirnya era reformasi di Indonesia (Wijaya & Permatasari, 2019). Masa kepemimpinan presiden Habibie berlangsung selama 512 hari namun meskipun singkat pada masa kepemimpinannya presiden Habibie telah mampu membawa perubahan yang sangat besar pada stabilitas demokrasi, reformasi, sistem politik dan ekonomi. Selama masa kepemimpinannya B.J. habibie berhasil membangun landasan demokrasi, mengelola sektor ekonomi sehingga menghadirkan perubahan sistem politik bagi Indonesia (Diana, 2018).

C. Sistem Politik Pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie

Transfer kepemimpinan dari presiden soeharto kepada wakilnya B. Habibie sejak 21 mei 1998 telah memberikan berbagai perubahan yang sangat berarti dalam sistem politik Indonesia. Perubahan sistem politik dimasa orde baru ke era kepemimpinan Presiden B.J Habibie dirasakan dari semula Indonesia menganut sistem politik dengan corak otoriter di masa kepemimpinan orde baru dibawah kepemimpinan presiden soeharto, pada masa kepemimpinan presiden B.J Habibie sistem politik Indonesia menjadi sistem politik demokratis. Pada masa pemerintahan B.J habibie perubahan sistem politik menjadi lebih demokratis dari era pemerintahan sebelumnya, jika pada pemerintahan sebelumnya sistem politik antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralis, maka pada masa pemerintahan presiden B.J habibie sistem politik berubah menjadi lebih desentralisasi (Kacung, 2010).

Sistem politik yang diterapkan presiden B.J. Habibie pada masa kepemimpinannya bersama kabinet reformasi pembangunan yang dipimpinnya, lebih memungkinkan bagi rakyat untuk dapat menyalurkan pendapatnya, pada masa pemerintahan habibie pola sistem politik yang semula bercorak otoriter, telah berganti menjadi sistem politik demokratis dengan dibentuknya undang – undang yang lebih demokratis. Meskipun pada masa kepemimpinan presiden B.J habibie sistem politik di Indonesia tidak sepenuhnya berubah ke arah sistem politik demokrasi seutuhnya, namun sistem politik di masa kepemimpinannya telah berubah dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik transisi demokrasi, pada pemerintahan B.J habibie terjadi perubahan sistem politik utamanya dalam sistem partai politik dan pemilu pada masa pemerintahan B.J habibie sistem politik yang digunakan lebih demokratis dengan mengedepankan kedaulatan rakyat, oleh keran itu sistem kepartaian pada masa presiden B.J habibie tidak lagi menganut sistem setengah partai melainkan menganut sistem multi partai. Pada masa pemerintahan presiden habibie terdapat lebih banyak partai dan perubahan sistem pemilihan

umum, yang membuat terbukanya ruang lebih lebar bagi warga untuk terlibat lebih aktif di ruang politik pada masa pemerintahan B.J habibie sistem politik Indonesia telah memasuki tahap konsolidasi demokrasi meski masih dengan proses yang lama dan lambat. Pada masa pemerintahan presiden habibie sistem politik di Indonesia yang semula bercorak otoriter dengan sistem kepemimpinan sentralisasi telah mengalami perubahan sistem kepemimpinan yang mengarah pada kepemimpinan desentralisasi (Kacung, 2010), Berbagai kebijakan dilakukan di masa kepemimpinan presiden habibie untuk merubah sistem politik yang semula bercorak otoriter menjadi sistem politik yang lebih demokratis, diantaranya pada kepemimpinannya presiden B.J habibie melakukan reformasi ekonomi, melakukan pemulihan legitimasi politik, melakukan amandemen pada UUD 1945, melakukan upaya penegakan HAM, membuka jalan lahirnya kebebasan pers, hingga referendum timor – timor. Kebijakan presiden B.J habibie dalam melakukan upaya amandemen UUD 1945 menjadi salah satu jalan pembuka terbentuknya perubahan sistem politik Indonesia, ke arah sistem politik desentralisasi, dan demokratis, sistem politik demokratis memiliki corak adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan masa kepemimpinan yang terbatas. Masa kepemimpinan di era soeharto yang tidak terbatas telah menjadi ciri sistem politik otoriter, olehnya presiden B.J habibie, melakukan perubahan sistem politik Indonesia dengan melakukan amandemen UUD 1945 salah satunya dengan menetapkan adanya pembagian kekuasaan pada lembaga – lembaga negara dan adanya pembatasan masa jabatan presiden, dengan maksimal 2 kali masa jabatan, dengan rentang waktu satu kali jabatan selama 5 tahun agar pemerintahan terkontrol dan menghindarkan Indonesia dari sistem politik otoriter (Pureklolon, 2020).

Semasa kepemimpinan presiden habibie segera melakukan upaya penghapusan sistem politik pada masa pemerintahan sebelumnya dan menggantikannya dengan sistem politik yang lebih demokratis di bawah kepemimpinannya dengan melakukan dorongan kepada DPR untuk melakukan upaya penyempurnaan undang – undang politik dimana pada masa kepemimpinan presiden merubah sistem politik Indonesia dengan melakukan penyempurnaan perundangan partai politik, penyempurnaan perundangan sistem pelaksanaan pemilihan umum hingga UUD terkait kedudukan MPR dan DPR. Pada masa kepemimpinan presiden habibie, sistem politik Indonesia lebih terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam aktivitas politiknya dengan melakukan upaya perluasan partai politik dan sistem pemilihan umum untuk pertama kalinya dilakukan secara terbuka. Pada masa kepemimpinannya, B.J habibie berhasil merubah sistem politik menjadi lebih demokratis dengan melaksanakan pemilu multi partai yang damai dan pemilihan presiden secara langsung dan demokratis. Pada masa kepemimpinannya, sistem pemilihan umum dijalankan secara langsung, rahasia, jujur dan adil yang melibatkan lebih banyak partai politik yakni sebanyak 48 partai politik jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya(Wijaya & Permatasari, 2019).

Pada bidang politik, kepemimpinan presiden habibie melakukan terobosan dengan membuka kran demokrasi yang sempat terhenti selama masa orde baru, upaya reformasi sistem politik di era kepemimpinan B.J. habibie dilakukan dengan upaya pemantapan rencana pemilihan umum dengan program – program yang jelas, membuat rancangan RUU pemilihan umum dan partai politik sekaligus

waktu penetapannya, mengubah ketetapan – ketetapan MPR terkait pemilu, dan sidang umum pemilihan presiden, selama masa kepemimpinannya presiden habibie juga melakukan penyeimbangan kekuasaan antara kekuasaan legislative dan eksekutif. Pada masa pemerintahan presiden habibie pergeseran sistem politik dari otoriter ke demokrasi berjalan begitu cepat, sehingga menyebabkan determinasi pergeseran dominasi dan determinasi yang sebelumnya berpusat pada kekuasaan eksekutif kearah dominasi kekuasaan legislatif. Pada masa kepemimpinannya presiden habibie melakukan upaya pendistribusian kebijakan sistem politiknya secara merata pada lembaga – lembaga pemerintahan, dengan mengurangi dominasi lembaga eksekutif atau presiden dan membaginya dengan lembaga lain dan melaksanakan sistem check and balance. Sistem politik era presiden B.J. Habibie adalah demokratis. Keseriusan perubahan sistem politik di era kepemimpinannya juga ditandai dengan adanya kebijakan pembebasan tahanan politik, kebebasan pers, pelaksanaan pemilu secara langsung, memperluas keikutsertaan partai politik dalam pemilihan hingga umum (Diana, 2018); (Kacung, 2010).

CONCLUSION

Sistem politik adalah sebuah kerangka yang menjelaskan tentang sebuah prinsip yang bersifat utuh dan memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan yang memiliki fungsi dalam mengatur pemerintahan dalam suatu negara. Sistem politik pada suatu negara dapat berubah dari periode satu ke periode lainnya, perubahan pada sistem politik yang dianut pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial, ekonomi suatu negara, adanya tuntutan masyarakat akan keinginan adanya perubahan pada negara tersebut. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem politik. Perubahan paling besar dan mencolok terjadi pada masa transisi dari periode pemerintahan soeharto ke pemerintahan presiden B.J habibie. Presiden B. J. habibie mulai menjabat kepemimpinan sebagai presiden pada 21 mei 1998 TAP MPR No.VII 1973. Masa kepemimpinan B.J habibie disebut dengan kabinet reformasi pembangunan yang menjalankan kepemimpinannya selama 512 hari dari 1998 -1999 selama kepemimpinannya yang singkat habibie membawa perubahan yang signifikan dalam membentuk fondasi demokrasi, kestabilan politik ekonomi, dan berhasil mengelola politik dan ekonomi hingga membawa perubahan pada sistem politik di Indonesia yang menandai masa reformasi Indonesia.

Pemerintahan B.J Habibie membawa perubahan sangat besar dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia, pada pemerintahan habibie sistem politik Indonesia berubah menjadi sistem politik demokratis, dari sebelumnya sistem politik otoriter. Meski pada masa kepemimpinannya Indonesia belum seutuhnya dapat dikatakan demokratis , namun pada masa kepemimpinan B. J. habibie sistem sistem politiknya mengarah pada sistem transisi demokrasi, dalam prakteknya sistem politik di masa kepemimpinan habibie dilakukan dengan sistem terbuka dan mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas politiknya, demi kedaulatan masyarakat. Sistem politik pemerintahan B.J. Habibie juga mengarah pada sistem desentralisasi tidak lagi sentralisasi, sistem politik pada masa kepemimpinannya tidak lagi berpusat pada presiden dengan pihak eksekutif dominan, namun sistem politik bersifat desentralisasi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah,

membagi kekuasaan pada lembaga – lembaga pemerintah secara rata, juga melakukan upaya pembatasan masa jabatan presiden dengan melakukan amandemen UUD 1945. Sistem politik pada pemerintahan B.J Habibie dilakukan dengan terbuka dan demokratis ditandai dengan disahkannya peraturan terkait partai politik, UU pemilihan umum hingga UU ketetapan MPR terkait pemilihan umum dan Kepresidenan. Sistem politik pada masa jabatannya lebih terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat, pemilihan umum dilakukan secara terbuka, jujur dan rahasia, dan dilakukan perluasan kepesertaan partai politik menjadi 48 partai politik. Sistem politik pada masa B.J. Habibie menekankan sistem politik yang demokratis, bukan otoriter dengan memberikan kebebasan bersuara, kebebasan pers, dan upaya pengeluaran tahanan politik. Sistem politiknya juga tidak hanya berfokus pada dominasi eksekutif namun juga menyeimbangkan dominasi legislatif dalam menjalankan fungsinya.

REFERENCES

- Anwar, D. F. (2010). The Habibie Presidency: Catapulting Towards Reform. In E. Aspinall & G. Fealy (Eds.), *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in honor of Harold Crouch* (1st ed.). ANU Press. <https://doi.org/10.22459/SNOL.08.2010.07>
- Budi, W. (2007). *Sistem politik Indonesia era reformasi*. MedPress.
- Diana, F. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kacung, M. (2010). *Sistem politik Indonesia konsolidasi demokrasi pasca-Orde Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Komara, E. (2016). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>
- Kurniawan, A. D., Sukriono, D., & Atok, R. A. (2021). B.J. Habibie's Political Thought in Democratization in Indonesia. *Journal of Politics and Policy*, 3(2).
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sahya, A. (2013). *Buku Sistem Politik Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Wijaya, J. H., & Permatasari, I. A. (2019). Capaian Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Megawati di Indonesia. *CAKRAWALA*, 12(2), 196–207. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>